

TAJUK RENCANA

Nasib ’Generasi Covid-19’

PANDEMI Covid-19 benar-benar telah menjadi ancaman serius bagi generasi yang saat ini masih belajar di tingkat Taman Kanak-kanak sampai tingkat Sekolah Menengah Atas. Karena harus menghadapi pandemi Covid-19 yang sempat menghambat dan mengakibatkan banyak perubahan di berbagai sektor kehidupan, mereka layak disebut ’Generasi Covid-19’. Generasi korban pandemi Covid-19.

Salah satu dampak yang cukup terasa adalah proses kegiatan belajar mengajar yang terpaksa tidak bisa dilakukan secara tatap muka, tetapi harus secara daring. Juga sudah cukup lama anak-anak harus menjalani berbagai pembatasan, khususnya pembatasan sosial dan pembatasan jarak antarfisik manusia. Karena itu sudah ada pihak-pihak yang mulai khawatir bahwa negeri ini akan kehilangan satu generasi yang ’tersekat’ oleh nilai-nilai sosial.

Di sisi lain, kalangan orang tua siswa sudah semakin mengkhawatirkan kondisi kejiwaan anak-anak mereka yang sudah semakin jenuh. Selama lebih dari tiga bulan hanya ’terbelenggu’ di rumah, anak-anak mereka dikhawatirkan tidak lagi mengenal nilai-nilai sosial.

Di tengah kejenuhan anak dan kekhawatiran orang tua siswa, mendadak muncul pro-kontra soal Program Organisasi Penggerak (POP) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI. Bahkan Mendikbud sempat menjadi ’bulan-bulanan’ di media sosial maupun media elektronik. Sampai akhirnya ’Mas Menteri’ Nadiem Makarim minta maaf dan menyata-

kan akan membatalkan POP. Tetapi itu juga belum menjawab tantangan dunia pendidikan saat ini.

Belum sempat gaduh POP bertalu, pernyataan mengagetkan diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi (Dirjen Diksi) Kemen-dikbud, Wikan Sakarinto. Bahwa saat ini Kemendikbud baru sebatas memotivasi menyiapkan kurikulum khusus menghadapi kondisi darurat seperti pandemi Covid-19 ini.

Menurutnya, Kemendikbud saat ini sedang merancang kurikulum untuk kondisi khusus. Kurikulum itu nantinya akan menekankan tiga prioritas fondasional, yaitu literasi, numerasi, dan pendidikan karakter. Guru akan dibekali kurikulum yang menjadikan siswa merasa nyaman saat mengikuti pembelajaran di masa pandemi, sehingga psikologi siswa, guru maupun orangtua bisa lebih baik.

Sungguh, sangat sulit diterima oleh akal sehat, bahwa dalam kondisi para siswa merasa jenuh karena terbelenggu berbagai pembatasan dan orang tua selalu dihipnotis kekhawatiran, Kemendikbud masih sebatas memotivasi untuk menyusun kurikulum. Dalam kondisi negeri ini terancam kehilangan satu generasi ’emas’ yang kehilangan nilai-nilai sosial, Kemendikbud masih berbicara sebatas wacana, narasi, teori.

Kalau Kemendikbud masih sebatas memotivasi menyiapkan kurikulum khusus, sampai kapan anak-anak sekolah akan tersiksa oleh kondisi pandemi Covid-19? Cukupkah hanya disikapi dengan motivasi penyusunan kurikulum khusus? □

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 1 (1) UU No 23/2002

PERINGATAN Hari Anak Nasional (HAN) belum usai, ketika muncul di media dan viral di media sosial ’Kasus Jepara’ mengenai 240 siswa SMA hamil. Meski berita itu cepat direspons dan ’diralat’ oleh Bupati Jepara. Menurutnya, angka 240 itu adalah akumulasi sejak Januari - Juni 2020. Dan mereka yang meminta dispensasi nikah berusia 16-18 tahun. Bisa saja sudah lulus SMA, putus sekolah atau bahkan tidak sekolah. (KR, 26/7).

Dispensasi menikah dimintakan ke Pengadilan Agama, pasti karena anak belum cukup usia untuk menikah. Artinya, di bawah 18 tahun adalah masih anak-anak. Sehingga persoalan-nya tidak semata-mata mereka adalah siswa SLTA, namun substansinya terletak pada pernikahan anak. Sebuah pernikahan yang seyogianya dihindari karena pelbagai pertimbangan terutama pertimbangan psikis dan kesehatan reproduksi.

Tulisan ini tak akan bicara ’Kasus Jepara’. Meski kita selalu ’geger’ ketika ada pemberitaan menyangkut angka siswa SMA hamil. Meski persoalan substansinya adalah usia anak yang meningkatkan tingginya angka pernikahan anak.

Revisi

Pernikahan anak masih terjadi, karena mudahnya mendapatkan dispensasi. Di dalam pasal 7 UU Perkawinan disebutkan, *orang tua dapat meminta dispensasi jika ada alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*. Walau UU No 16/2019 tentang perubahan UU No 1/1974 tentang Perkawinan telah menaikkan usia minimal kawin perempuan menjadi 19 tahun mengapa pernikahan anak masih tinggi? Padahal revisi usia nikah ini dengan harapan akan menurunkan angka pernikahan anak.

Fadmi Sustiwi

Pasalnya, ketentuan dispensasi tidak ikut direvisi dan itu *bak simalakama*. Ketika ada bukti-bukti pendukung yang kuat - biasanya karena KTD - pengadilan agama akan memberikan kelonggarannya. Dengan kata lain, peluang dispensasi tetap memunculkan pernikahan anak. Apalagi jika kemudian faktor budaya ikut



KR-JOKO SANTOSO

berbicara. *Anakku wis payu* adalah ungkapan sebagian orang tua di pedesaan begitu gembira memiliki anak yang dilamar meski masih berusia muda. (KR, 28/7). Ini menjadi bukti bila keluarga berperan besar dalam menebarkan nilai-nilai pernikahan.

Padahal banyak persoalan yang perlu dipahami, mengapa pernikahan anak sebaiknya dihindari. Ketua BKKBN Hasto Wardoyo (MP, minggu II Juli) mengemukakan salah satu alasan biologis karena Allah menciptakan organ reproduksi yang belum sempurna pada anak-anak. Bila belum usia 20 tahun sudah melakukan hubungan seksual, maka sejatinya anak perempuan sedang berinvestasi terjadinya

Pendidikan Vokasi untuk Kemandirian Masyarakat

Sutrisna Wibawa & Moch Bruri Triyono

hadirkan. Yaitu munculnya kesadaran untuk mandiri, mengejar ketertinggalan teknologi, dan memenuhi hajat hidupnya sendiri sebagai sebuah bangsa yang berdaulat. Dalam tataran teknis, gerakan ini memaksa Kulonprogo melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Usaha Kecilnya (UMKM) untuk segera mengaplikasikan teknologi bermutu tinggi. Masyarakat yang tergerak dengan kebijakan ini meningkatkan permintaan atas produk lokal dengan sangat signifikan.

Meningkatkan Kesejahteraan

Dalam tataran kesejahteraan, gerakan ini juga menggairahkan aktivitas ekonomi di daerah. Maka, muncullah Tomira (Toko Milik Rakyat), yang merombak toko-toko modern di Kulonprogo dari milik segelintir elite pemilik waralaba berjejaring, menjadi milik koperasi masyarakat setempat. Juga ada Batik Gebleg Renteng yang telah dipatenkan Penda Kulonprogo, produksi teh dan kopi lokal bermodalkan lahan 200 hektare di daerah utara Kulonprogo, beras lokal yang diproduksi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), serta yang paling populer: Air-Ku dengan mengandung makna ideologis sangat kuat sebagai ’Air Saya’ dan ’Air Kulonprogo’.

Semua aktivitas tersebut memanfaatkan teknologi unggul yang sifatnya vokasional. Dan hasilnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kulonprogo. Hasto dalam kepemimpinannya telah terbukti konsisten menurunkan angka kemiskinan di Kulonprogo, setidaknya-tidaknya 1% setiap tahun. Dari penurunan kemiskinan, dampak hakiki dari gerakan transformasional ini menghadirkan dimensi paripurnanya: yakni tataran perubahan sosial. Guna menjaga transformasi

terus berlanjut, peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan vokasi merupakan kombinasi mujarab dalam meningkatkan kemandirian masyarakat. Dunia pendidikan siap menyambut asa ini lewat bermunculannya banyak SMK di Kulonprogo. Dalam konteks ini pula, UNY menghadirkan Kampus di Wates, yang didedikasikan penuh untuk pendidikan vokasi.

Kelak, pendidikan vokasi akan menjadi pusat para pemikir handal untuk mendukung teknologi dan pemberdayaan masyarakat vokasional. Serta, menghadirkan inovasi dan kreativitas berbasis komunitas, akan menjadikan masyarakat sekitarnya sebagai laboratorium utama dalam pendidikan keterampilan. Sebagai nakhoda BKKBN, Pak Hasto dapat mengembangkan keterampilan vokasional untuk ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri. □

**Sutrisna Wibawa, Rektor dan Guru Besar pada FBS UNY*
** Moch Bruri Triyono, Guru Besar dan Ketua Prodi PTK Pascasarjana UNY*
Naskah kerja sama UNY - KR

Pojok KR

Penyembelihan hewan kurban di berbagai tempat berlangsung lancar dan aman.
-- Alhamdulillah.

Desain konstruksi Tol Yogya-Solo sudah ’clear’.
- Cukup desain?

Tamansiswa menilai arah pendidikan nasional saat ini tidak jelas.
- Gara-gara POP.

Berabe



Pikiran Pembaca

Pikiran Pembaca terbuka bagi siapa saja. Naskah dikirim ke kantor Redaksi Kedaulatan Rakyat, Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40-42 Yogyakarta 55232 Fax (0274) 563125 Telp (0274) 565685 (Hunting) atau melalui email pikiranpembaca@gmail.com. Naskah dilengkapi fotokopi atau scan identitas diri berikut nomor telepon yang bisa dihubungi. Isi tanggung jawab penulis.

Supervisi Sekolah

PERKEMBANGAN era Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang begitu cepat dan menyeluruh di semua bidang memiliki pengaruh besar dalam dunia pendidikan, terlebih saat era pandemi ini. Dalam bidang supervisi di mana hal tersebut harus dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas untuk kualitas dari sekolah, kegiatan supervisi yang dilakukan tentunya tidak mudah, terlebih dengan beragamnya karakteristik dan kesiapan mental para guru yang akan disupervisi. Untuk itu penggunaan alat bantu atau media ICT dapat menyelesaikan hal tersebut.

Supervisi akademik memberikan kontribusi penting bagi pengawas dan guru dalam memetakan, melaksanakan dan mengevaluasi program kerja yang telah ditetapkan berdasarkan kurikulum 2013. Ini dari revolusi kurikulum sebagaimana yang terjadi di negeri kita adalah sebagai prosedur pengembangan pendidikan yang bisa menjadi acuan dan dapat divalidasi oleh pihak yang berkepentingan dan dapat dilaksanakan secara massif. (John D:1990, 60).

Pada bidang pengawasan pendidikan di lapangan masih didapati kendala, yaitu tentang jumlah pengawas yang masih kurang. Hal tersebut dapat diatasi dengan memanfaatkan program supervisi berbasis online. Tantangan bagi para supervisor adalah untuk memperluas kesempatan bagi para guru dengan memanfaatkan pendekatan yang terintegrasi dalam rangka meningkatkan kompetensi profesio-

nal (Sally J. Zepeda: 2003, 3).

Saat ini banyak sekali teknologi yang bisa dimanfaatkan dalam melakukan kegiatan supervisi, salah satunya adalah supervisi virtual (internet). Kendala minimnya interaksi antara supervisor dengan guru secara langsung, waktu dan tempat pelaksanaan supervisi yang selama ini menjadi hambatan akan mudah teratasi dengan sistem ini. Model supervisi berbasis virtual sangat efektif dan efisien, hal ini dikarenakan seorang supervisor dapat memantau aktivitas guru binaannya tidak harus di sekolah, tanpa batasan waktu, tempat dan jarak. Selain itu, model ini dapat lebih memberikan keleluasaan bagi guru untuk menyampaikan aspirasi/masukan terkait dengan kualitas pembelajaran tanpa harus bertatap muka secara langsung dengan seorang supervisor.

Dengan supervisi berbasis virtual, seorang supervisor dalam satu tempat dapat mengontrol banyak guru yang ada di sekolah berbeda. Hal ini tentunya tidak bisa dilakukan apabila masih memakai cara konvensional, di mana pada satu tempat supervisor hanya mampu melayani guru yang ada di sekolah tersebut. Kolaborasi antara supervisor dengan guru lintas sekolah yang berbeda lewat diskusi online diharapkan mampu menghasilkan banyak kajian dalam peningkatan mutu pembelajaran terlebih dalam masa pandemi Covid-19 ini, yang mau tidak mau semua kegiatan berbasis virtual. □

Barokatussolihah SAg MSI
Pengawas Kemenag Kulonprogo.

TIDAK ada satu negara-pun yang dapat mencapai kesejahteraan sosial melalui pembangunan berkelanjutan tanpa investasi besar dalam sumber daya manusia. Pendidikan sebagai instrumen peradaban dapat memperkaya pemahaman orang tentang diri mereka sendiri dan dunia. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran mempromosikan jiwa kewirausahaan melalui pemanfaatan kemajuan teknologi. Pendidikan vokasional merupakan proses bagaimana mengembangkan tenaga kerja masyarakat melalui berbagai keterampilan dan usaha.

Dokter Hasto Wardoyo, SpOG(K), Kepala BKKBN, yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Kulonprogo, dapat kita rujuk sebagai salah satu *best practice* pemberdayaan masyarakat vokasional yang ada di DIY. Kepemimpinannya membuktikan, ia tak hanya mahir di bidang kesehatan, tapi juga mampu menggerakkan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup warganya.

Inilah yang menjadi landasan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), menganugerahkan gelar Doktor Honoris Causa Bidang Teknologi dan Pemberdayaan Masyarakat Vokasional. Kebermanfaatan dan pemanfaatan teknologi yang telah dilakukan Hasto merupakan praksis yang layak diberi penghargaan tertinggi dunia akademik.

Memberdayakan Kulonprogo

Perpaduan antara teknologi dan pemberdayaan masyarakat vokasional, dapat ditilik kehadirannya dari beberapa kebijakan strategis Hasto. Gerakan Bela dan Beli Kulonprogo misalnya, menjadi gerakan ideologis untuk membela bangsa sendiri dengan membela produknya. Sekaligus gerakan membeli produk sendiri yang secara ekonomi, rakyat akan membangun sistem kendali dan meningkatkan peredaran uang di lokal atau lingkungannya.

Gerakan ini menghadirkan transformasi yang multidimensi. Dalam tataran intelektual, ada perubahan cara berpikir yang di-

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB.

Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurika Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio** : KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro: **Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Semarang** : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No 5, Purwokerto, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti.

Magelang : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.